

Nama : Virginia Shaulan Zailani

NPM : 2413031069

Kelas : B

STUDY CASE

studi kasus PT Lestari Mineral, saya melihat bahwa pilihan manajemen untuk menggunakan kebijakan akuntansi konservatif dalam mengakui biaya lingkungan jangka panjang, khususnya reklamasi tambang, mencerminkan perilaku kehati-hatian (prudence). Motivasi utama dari perilaku ini menurut saya adalah keinginan manajemen untuk meminimalkan risiko pelaporan keuangan yang terlalu optimistis, mengingat industri pertambangan memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi, baik dari sisi harga komoditas, regulasi lingkungan, maupun tuntutan sosial. Dengan mengakui biaya lingkungan secara lebih awal dan konservatif, manajemen berupaya menjaga kredibilitas laporan keuangan serta menghindari potensi masalah hukum dan reputasi di masa depan. Dampaknya terhadap para pemangku kepentingan cukup beragam. Investor jangka panjang dan regulator cenderung diuntungkan karena memperoleh informasi yang lebih realistis dan transparan, sementara investor yang berorientasi pada laba jangka pendek mungkin merasa dirugikan karena laba yang dilaporkan menjadi lebih rendah.

Jika saya berada pada posisi sebagai akuntan perusahaan, saya akan menyikapi tekanan dari investor luar negeri dengan sangat hati-hati dan profesional. Menurut pandangan saya, tekanan untuk mengubah kebijakan akuntansi demi menampilkan laba yang lebih tinggi harus dievaluasi secara kritis, apakah benar-benar masih berada dalam koridor standar akuntansi yang berlaku dan mencerminkan substansi ekonomi yang sebenarnya. Mengikuti keinginan investor semata tanpa mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, keandalan, dan penyajian wajar dapat bertentangan dengan prinsip etika profesi akuntan, khususnya integritas, objektivitas, dan independensi. Bagi saya, tugas utama akuntan bukanlah memaksimalkan laba yang dilaporkan, melainkan menyajikan informasi keuangan yang jujur, relevan, dan dapat dipercaya untuk semua pihak yang berkepentingan.

Saya juga melihat bahwa proses penetapan standar akuntansi tidak pernah sepenuhnya netral, melainkan sangat dipengaruhi oleh ekonomi politik, baik di tingkat nasional maupun global. Dalam kasus ini, pemerintah Indonesia berupaya merumuskan standar akuntansi yang mencerminkan nilai keberlanjutan dan transparansi sosial, namun proses tersebut dipengaruhi oleh tekanan politik dari asosiasi industri yang mungkin merasa terbebani jika standar terlalu ketat. Di tingkat global, IFRS sendiri tidak lepas dari pengaruh negara-negara dan investor besar yang memiliki kepentingan terhadap

fleksibilitas pelaporan keuangan. Contoh nyata lainnya adalah perdebatan internasional mengenai standar pelaporan keberlanjutan (sustainability reporting), di mana kepentingan negara maju, pasar modal global, dan perusahaan multinasional sangat memengaruhi arah dan isi standar yang dihasilkan.

Dalam membandingkan pendekatan standard-setting berbasis prinsip seperti IFRS dengan pendekatan berbasis aturan seperti GAAP, saya berpendapat bahwa masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan. Pendekatan berbasis prinsip memberikan fleksibilitas dan menekankan pada substansi ekonomi, sehingga mendorong profesionalisme dan pertimbangan etis dari akuntan. Namun, pendekatan ini juga membuka ruang bagi interpretasi yang agresif jika tidak diimbangi dengan integritas yang kuat. Sebaliknya, pendekatan berbasis aturan memberikan kepastian dan panduan yang lebih rinci, tetapi cenderung kaku dan mendorong praktik “kepatuhan formal” tanpa memperhatikan substansi. Dalam konteks Indonesia, menurut saya pendekatan berbasis prinsip lebih relevan untuk diterapkan, asalkan didukung oleh pengawasan yang kuat, penegakan etika profesi, dan budaya transparansi. Hal ini penting agar standar akuntansi tidak hanya menjadi alat teknis pelaporan, tetapi juga sarana untuk mendukung akuntabilitas, keberlanjutan, dan keadilan sosial.